

Penerapan Prinsip *Wakalah Bil Ujah* Pada Pembayaran KRS Melalui Tokopedia: Perspektif Fiqh Muamalah

Elga Putri Asri¹⁾, Ramdanil Mubarak²⁾, Jamila³⁾

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur

Email: elgaputriasri1207@gmail.com, danil.education@gmail.com,

Ogiebarru87@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran pada berbagai sektor, termasuk layanan administrasi pendidikan tinggi. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembayaran Kartu Rencana Studi (KRS) melalui platform digital Tokopedia. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, mekanisme tersebut perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan prinsip wakalah bil ujah. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembayaran KRS melalui Tokopedia, mengidentifikasi penerapan prinsip wakalah bil ujah dalam transaksi tersebut, serta menilai kesesuaiannya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di STAI Sangatta. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap sepuluh mahasiswa program weekend, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran KRS melalui Tokopedia dilaksanakan melalui tahapan pembuatan tagihan pada Sistem Informasi Akademik, input kode pembayaran, pemilihan metode pembayaran, dan konfirmasi transaksi secara digital. Mekanisme tersebut memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi bagi mahasiswa. Dari perspektif fiqh muamalah, transaksi telah memenuhi unsur-unsur wakalah bil ujah karena terdapat pemberi kuasa (muwakkil), penerima kuasa (wakil), objek yang diwakilkan, serta imbalan jasa yang disepakati secara transparan. Dengan demikian, praktik pembayaran KRS melalui Tokopedia dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah selama memenuhi asas amanah, kejelasan akad, dan transparansi biaya.

Kata kunci: *Wakalah Bil Ujah, Pembayaran KRS, Tokopedia, Fiqh Muamalah, Transaksi Digital*

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed payment systems across various sectors, including higher education administrative services. One of these innovations is the use of the Tokopedia platform for Course Registration Card (KRS) payments. Despite offering greater convenience and efficiency, the mechanism requires assessment from the

Page **775** of **790**

perspective of Islamic economic law, particularly regarding the implementation of the wakalah bil ujah contract. This study aims to analyze the KRS payment mechanism through Tokopedia, identify the implementation of wakalah bil ujah principles, and evaluate its compliance with Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). A qualitative case study approach was employed at STAI Sangatta. Data were collected through observations, in-depth interviews with ten weekend-class students, and documentation, and were analyzed using data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the payment process involves bill generation through the academic information system, payment code input, payment method selection, and digital transaction confirmation. The system provides convenience, flexibility, and administrative efficiency for students. From the perspective of fiqh muamalah, the transaction fulfills the essential elements of wakalah bil ujah, including the existence of the principal (muwakkil), the agent (wakil), a clearly defined object of representation, and a transparent service fee (ujrah). Therefore, the KRS payment mechanism through Tokopedia is considered compliant with Islamic principles, provided that the transaction maintains trustworthiness, contractual clarity, and fee transparency.

Keywords: *Wakalah Bil Ujah, KRS Payment, Tokopedia, Fiqh Muamalah, Digital Transaction*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem administrasi dan layanan keuangan pada institusi pendidikan tinggi. Transformasi digital mendorong perguruan tinggi untuk mengadopsi sistem pembayaran elektronik yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan pelayanan bagi mahasiswa. Salah satu implementasi yang banyak digunakan adalah pemanfaatan *marketplace* sebagai media pembayaran berbagai jenis tagihan akademik, termasuk pembayaran Kartu Rencana Studi (KRS). Melalui sistem tersebut, mahasiswa tidak lagi bergantung pada pembayaran secara langsung di loket kampus, melainkan dapat melakukan transaksi kapan saja dan dari mana saja. Digitalisasi layanan administrasi ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi operasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya modernisasi tata kelola perguruan tinggi yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Di sisi lain, kemudahan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran digital memunculkan berbagai persoalan baru dalam perspektif ekonomi syariah. Keterlibatan pihak ketiga sebagai penyedia layanan pembayaran menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk akad yang digunakan, kedudukan hukum para pihak, serta kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Dalam transaksi berbasis syariah, setiap mekanisme pembayaran harus didasarkan pada akad yang jelas, memenuhi unsur kerelaan para pihak, menghindari praktik gharar, riba, maupun unsur ketidakpastian lainnya. Salah satu akad yang relevan dalam transaksi pembayaran melalui perantara adalah *wakalah bil ujah*, yaitu akad pelimpahan kuasa yang disertai pemberian imbalan kepada pihak yang menjalankan kuasa tersebut. Oleh karena itu, penerapan layanan pembayaran digital perlu dikaji tidak hanya dari aspek kemudahan layanan, tetapi juga dari sisi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad *wakalah bil ujah* telah banyak diterapkan pada berbagai layanan keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan, *financial technology (fintech)*, maupun layanan pembayaran elektronik. Hasil penelitian tersebut umumnya menyimpulkan bahwa akad *wakalah bil ujah* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung transaksi modern selama memenuhi rukun, syarat, serta prinsip transparansi dan amanah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada sektor lembaga keuangan syariah dan industri jasa keuangan, sedangkan kajian mengenai implementasi akad tersebut pada sistem pembayaran administrasi pendidikan melalui platform *marketplace* masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ruang penelitian yang masih perlu dikembangkan, khususnya pada konteks digitalisasi layanan administrasi di lingkungan perguruan tinggi.

STAI Sangatta merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan pembayaran KRS secara digital melalui platform Tokopedia, terutama bagi mahasiswa program weekend yang sebagian besar merupakan pekerja aktif. Sistem ini memberikan fleksibilitas karena mahasiswa dapat melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kampus, sehingga

proses administrasi menjadi lebih praktis dan efisien. Meskipun demikian, penggunaan Tokopedia sebagai perantara pembayaran menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan beberapa pihak, yaitu mahasiswa sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*), Tokopedia sebagai pihak yang menerima kuasa (*wakil*), dan perguruan tinggi sebagai penerima pembayaran. Hubungan hukum tersebut memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa mekanisme transaksi telah memenuhi prinsip-prinsip *wakalah bil ujah* sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena mengkaji implementasi prinsip *wakalah bil ujah* dalam pembayaran administrasi akademik melalui platform *marketplace* pada lembaga pendidikan tinggi Islam. Selain mendeskripsikan mekanisme pembayaran yang diterapkan, penelitian ini juga mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut berdasarkan rukun dan syarat akad *wakalah*, meliputi keberadaan para pihak yang berakad, objek akad, bentuk pelimpahan kuasa, serta mekanisme pemberian imbalan (*ujrah*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai implementasi akad syariah pada ekosistem transaksi digital di sektor pendidikan yang hingga kini masih belum banyak memperoleh perhatian dalam literatur ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran Kartu Rencana Studi (KRS) melalui platform Tokopedia, mengidentifikasi penerapan prinsip *wakalah bil ujah* dalam mekanisme pembayaran tersebut, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan perspektif fiqh muamalah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi akad *wakalah bil ujah* pada layanan pembayaran digital di institusi pendidikan tinggi, sekaligus menjadi masukan bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem pembayaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip *wakalah bil ujah* dalam pembayaran Kartu Rencana Studi (KRS) melalui platform Tokopedia pada mahasiswa program weekend STAI Sangatta. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif fenomena yang terjadi di lapangan, terutama terkait mekanisme transaksi, hubungan hukum antar pihak, serta kesesuaian praktik pembayaran digital dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi akad *wakalah bil ujah* dalam sistem pembayaran administrasi akademik berbasis digital.

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri atas sepuluh mahasiswa program weekend yang pernah melakukan pembayaran KRS melalui Tokopedia serta memahami proses transaksi yang dilakukan. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pengalaman langsung mereka sebagai pengguna layanan pembayaran digital sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami alur pembayaran KRS melalui sistem akademik dan platform Tokopedia. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mahasiswa dalam menggunakan layanan pembayaran, persepsi terhadap mekanisme transaksi, serta pandangan mereka mengenai kemudahan dan kejelasan proses pembayaran. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk

melengkapi data penelitian melalui berbagai dokumen pendukung, seperti prosedur pembayaran KRS, bukti transaksi, serta dokumen administrasi yang berkaitan dengan sistem pembayaran di STAI Sangatta.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti memperoleh interpretasi yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi teknik melalui perbandingan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh dapat saling menguatkan dan menghasilkan temuan yang lebih valid.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Mekanisme Pembayaran KRS melalui Platform Tokopedia

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran Kartu Rencana Studi (KRS) di STAI Sangatta telah terintegrasi dengan platform Tokopedia sebagai media pembayaran digital. Proses pembayaran diawali dengan mahasiswa mengakses Sistem Informasi Akademik (SIKAD) untuk memperoleh kode pembayaran atau *virtual account*. Selanjutnya mahasiswa membuka aplikasi Tokopedia, memilih menu pembayaran pendidikan, memasukkan kode pembayaran yang diperoleh dari SIKAD, memverifikasi nominal tagihan, memilih metode pembayaran yang tersedia, kemudian menyelesaikan transaksi hingga memperoleh konfirmasi pembayaran. Metode pembayaran yang digunakan cukup beragam, meliputi transfer bank, *mobile banking*, *virtual account*, dompet digital (*e-wallet*), dan QRIS. Seluruh proses berlangsung secara daring sehingga mahasiswa tidak perlu datang langsung ke kampus maupun ke bank.

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi akademik. Mahasiswa dapat melakukan pembayaran kapan saja sesuai kebutuhan tanpa dibatasi jam operasional layanan kampus. Selain memberikan kemudahan akses, sistem ini juga mempercepat proses verifikasi pembayaran karena transaksi tercatat secara digital. Dokumentasi berupa bukti transaksi, tangkapan layar aplikasi Tokopedia, serta data pembayaran dari SIAKAD memperlihatkan bahwa seluruh tahapan pembayaran berlangsung secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Untuk memberikan gambaran mengenai alur pembayaran KRS melalui Tokopedia, mekanisme transaksi dapat diringkas sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pembayaran KRS melalui Tokopedia

Tahapan	Aktivitas Mahasiswa
1	Mengakses SIAKAD dan memperoleh kode pembayaran
2	Membuka aplikasi Tokopedia
3	Memilih menu pembayaran pendidikan
4	Memasukkan kode pembayaran (<i>virtual account</i>)
5	Memverifikasi nominal tagihan
6	Memilih metode pembayaran
7	Melakukan konfirmasi transaksi
8	Menerima notifikasi pembayaran berhasil

Sumber: Hasil observasi dan dokumentasi peneliti (2026).

Implementasi Prinsip *Wakalah Bil Ujah* dalam Pembayaran KRS

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas informan memahami bahwa transaksi pembayaran KRS melalui Tokopedia merupakan bentuk pelimpahan kuasa kepada pihak ketiga untuk menyampaikan pembayaran kepada perguruan tinggi. Mahasiswa bertindak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*), sedangkan Tokopedia dipandang sebagai pihak yang menerima kuasa (*wakil*) dalam memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa informan mampu mengidentifikasi hubungan hukum yang terjadi dalam mekanisme pembayaran digital, meskipun tingkat pemahaman mengenai konsep fiqh muamalah berbeda-beda antar mahasiswa.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok akad *wakalah bil ujah* telah tercermin dalam mekanisme pembayaran yang diterapkan. Mahasiswa secara sadar memberikan kuasa kepada Tokopedia untuk memproses pembayaran, objek transaksi berupa pembayaran biaya KRS telah ditentukan secara jelas melalui sistem akademik, sedangkan biaya administrasi (*fee*) dikenakan sebagai kompensasi atas layanan pembayaran yang diberikan oleh platform. Informan pada umumnya menilai bahwa mekanisme tersebut berlangsung secara transparan karena informasi mengenai nominal tagihan, biaya administrasi, serta tujuan pembayaran telah tersedia sebelum transaksi diselesaikan. Meskipun terdapat beberapa mahasiswa yang menganggap biaya administrasi relatif lebih tinggi dibandingkan metode pembayaran lain, mereka tetap memahami bahwa biaya tersebut merupakan bagian dari jasa layanan yang diberikan platform.

Persepsi Mahasiswa terhadap Pembayaran KRS melalui Tokopedia

Sebagian besar informan memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan Tokopedia sebagai media pembayaran KRS. Mereka menilai sistem tersebut mudah digunakan, praktis, serta memberikan fleksibilitas waktu karena pembayaran dapat dilakukan tanpa harus hadir secara langsung di kampus. Mahasiswa juga menyampaikan bahwa antarmuka aplikasi cukup mudah dipahami sehingga proses pembayaran dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan pembayaran digital telah mampu

memenuhi kebutuhan mahasiswa, khususnya mahasiswa program weekend yang memiliki keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi mahasiswa. Kendala tersebut antara lain jaringan internet yang kurang stabil, perlunya menyalin kode pembayaran dari SIAKAD ke aplikasi Tokopedia, serta masih adanya mahasiswa yang memerlukan pendampingan ketika melakukan pembayaran digital untuk pertama kalinya. Namun demikian, kendala tersebut bersifat teknis dan tidak menghambat penyelesaian transaksi secara keseluruhan. Mayoritas informan menyatakan bahwa manfaat sistem pembayaran digital masih jauh lebih besar dibandingkan hambatan yang mereka alami selama proses transaksi berlangsung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembayaran KRS melalui Tokopedia telah memberikan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas bagi mahasiswa STAI Sangatta. Selain mendukung digitalisasi layanan administrasi akademik, mekanisme tersebut juga memperlihatkan karakteristik transaksi yang memenuhi unsur pelimpahan kuasa, kejelasan objek transaksi, transparansi biaya, dan adanya persetujuan para pihak, sehingga menjadi dasar penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif fiqh muamalah pada bagian pembahasan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran Kartu Rencana Studi (KRS) melalui platform Tokopedia merupakan bentuk implementasi digitalisasi layanan administrasi akademik yang mampu meningkatkan efisiensi proses pembayaran. Seluruh tahapan transaksi, mulai dari penerbitan kode pembayaran melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), verifikasi tagihan,

pemilihan metode pembayaran, hingga konfirmasi transaksi dilakukan secara elektronik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap layanan pembayaran konvensional. Temuan ini memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program *weekend* yang memiliki keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital telah menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada perguruan tinggi.

Kemudahan yang dirasakan mahasiswa dalam menggunakan Tokopedia sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis. Model tersebut menjelaskan bahwa penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi mengenai kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat yang diperoleh pengguna (*perceived usefulness*). Mayoritas informan menilai bahwa sistem pembayaran melalui Tokopedia mudah dipahami, dapat diakses kapan saja, serta mampu mempercepat penyelesaian administrasi akademik (Hatidah et al., 2025; Marisya et al., 2025). Walaupun sebagian mahasiswa masih mengalami kendala teknis, seperti jaringan internet yang kurang stabil atau proses penyalinan kode pembayaran dari SIAKAD ke aplikasi Tokopedia, hambatan tersebut tidak mengurangi persepsi positif terhadap manfaat sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, tingkat penerimaan mahasiswa terhadap sistem pembayaran digital dapat dikategorikan tinggi karena manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan kendala yang dihadapi.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran KRS melalui Tokopedia telah memenuhi karakteristik akad *wakalah bil ujah*. Mahasiswa bertindak sebagai *muwakkil* yang memberikan kuasa kepada Tokopedia untuk menyampaikan pembayaran kepada pihak perguruan tinggi, sedangkan Tokopedia berperan sebagai *wakil* yang melaksanakan amanah tersebut dengan memperoleh kompensasi berupa biaya layanan (*ujrah*). Selain itu, objek transaksi telah ditentukan secara jelas melalui nominal tagihan yang diterbitkan oleh SIAKAD, sementara proses pembayaran dilakukan atas dasar persetujuan para pihak. Kejelasan mengenai subjek akad,

objek transaksi, serta keberadaan imbalan jasa menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah* sebagaimana dijelaskan dalam fiqh muamalah.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa transaksi pembayaran KRS melalui Tokopedia memenuhi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, yaitu adanya transparansi, kejelasan akad, kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), serta tidak ditemukannya unsur riba, gharar, maupun maysir. Seluruh informasi mengenai nominal pembayaran, biaya administrasi, serta tujuan transaksi telah tersedia sebelum mahasiswa menyelesaikan pembayaran sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai besaran biaya administrasi, mayoritas informan menganggap biaya tersebut sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh platform dan bukan sebagai bentuk tambahan yang bertentangan dengan prinsip syariah (Agustina, S. B., & Purwanto, 2025; Indriani et al., 2024). Oleh karena itu, praktik pembayaran tersebut dapat dinilai tetap berada dalam koridor hukum ekonomi Islam selama pelaksanaannya dilakukan secara transparan, amanah, dan sesuai dengan ketentuan akad yang disepakati.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa akad *wakalah bil ujah* dapat diterapkan secara efektif pada berbagai layanan transaksi digital, termasuk *marketplace*, *financial technology*, maupun sistem pembayaran elektronik (Agustina Sari et al., 2024; Hidayad et al., 2024). Namun demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda karena mengkaji implementasi akad tersebut pada pembayaran administrasi pendidikan tinggi melalui platform Tokopedia. Selama ini, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada transaksi jual beli daring, layanan perbankan syariah, ataupun pembayaran *cash on delivery*. Dengan demikian, penelitian ini

memperluas ruang lingkup implementasi akad *wakalah bil ujah* ke dalam konteks digitalisasi layanan administrasi akademik sehingga memberikan perspektif baru mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah pada sektor pendidikan tinggi.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa perguruan tinggi dapat memanfaatkan platform pembayaran digital sebagai alternatif layanan administrasi yang lebih efisien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Bagi pengelola perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan sistem pembayaran yang lebih terintegrasi, transparan, dan mudah diakses oleh mahasiswa (Harapan et al., 2024; Marsinah et al., 2024). Sementara itu, bagi pengembang platform digital, penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga kejelasan mekanisme transaksi, transparansi biaya layanan, serta perlindungan terhadap hak pengguna agar sistem pembayaran tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (Marsinah et al., 2024; Swarastuti et al., 2024). Dengan demikian, digitalisasi pembayaran administrasi pendidikan berpotensi mendukung tata kelola perguruan tinggi yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran Kartu Rencana Studi (KRS) melalui platform Tokopedia di STAI Sangatta telah dilaksanakan secara sistematis, efisien, dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan administrasi akademik. Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut memenuhi unsur-unsur akad *wakalah bil ujah* karena terdapat pemberi kuasa (*muwakkil*), penerima kuasa (*wakil*), objek transaksi yang jelas, serta imbalan jasa (*ujrah*) yang disampaikan secara transparan. Selain itu, mekanisme pembayaran juga memenuhi prinsip-prinsip syariah berupa kejelasan akad, kerelaan para pihak, amanah, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Oleh karena itu, penggunaan Tokopedia sebagai perantara pembayaran KRS dapat dipandang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah

dan berpotensi menjadi model digitalisasi layanan administrasi pendidikan yang efisien, transparan, dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah.

Daftar Pustaka

- Agustina, S. B., & Purwanto, M. B. (2025). Taman Kota Punti Kayu sebagai Ruang Hijau Kota : Edukasi Manfaat bagi Kesehatan Fisik dan Mental Bagi Masyarakat Kota Palembang. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 4(1), 243–259. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v4i1.3090>
- Agustina Sari, E., Rahma, M., & Purwanto, M. B. (2024). Assessing The Tourism Value of Temam Waterfall: Environmental and Economic Perspectives. *LIMEEMAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(2), 42–51. <https://ejournal.apmapi.or.id/index.php/Limeemas/article/view/35>
- Al-Bukhari, M. I. (1997). *Shahih Al-Bukhari* (3rd ed.). Dar Ibn Kathir.
- Al-Qurthubi, A. A. M. A. (n.d.). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anggraini, B., et al. (2022). *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. CV. Sinar Jaya Berseri.
- Arwanita, D., Rahman, A., & Syafii, M. (2022). Implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan otomotif dalam perspektif ekonomi Islam. *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Harahap, M. (2024). Peran Tokopedia dalam sistem pembayaran digital pendidikan. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 5(1), 33–41.
- Harapan, E., Marisya, F., Marsinah, M., Malini, S., & Purwanto, M. B. (2024). Assessing Work Habits and Discipline: High School Teachers in South Sumatra Province Post In-Service Teacher Professional Education Program (PPG-DALJAB). *Gema Wiralodra*, 15(2), 726–737. <https://doi.org/10.31943/gw.v15i2.707>
- Harun, M. H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.

- Hatidah, H., Indriani, R. A. F., Marsinah, M., & Purwanto, M. B. (2025). Etnografi Festival Kuliner Lokal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 5(1). <https://doi.org/10.36908/jimpa.v5i1.503>
- Hidayad, F., Ridayani, R., Purwanto, M. B., & Agustinasari, E. (2024). Transforming Education In The 5.0 Era: A Case Study On The Digital Readiness Of English Lecturers At Polytechnics. *Language and Education Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.52237/lej.v9i2.896>
- Ibrahim, A. (2023). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bumi Aksara.
- Ikhsan, M., Sapa, N. B., & Syatar, A. (2025). Ekonomi digital dan hukum ekonomi syariah: *E-commerce*, aset digital dan implikasi hukumnya menurut hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Indriani, RA Rodia Fitria Marisya, Hatidah, Marsinah, & M Bambang Purwanto. (2024). Pelestarian Tradisi Perayaan Cap Gomeh Di Pulau Kemaro: Revitalisasi Budaya Dan Penguatan Identitas Komunitas Tionghoa Palembang. *Melayani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 151–160. <https://doi.org/10.61930/melayani.v1i3.151>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Marisya, F., Hatidah, H., Marsinah, M., Wahasusmiah, R., & Purwanto, M. B. (2025). Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Branding bagi Pengelola Homestay dan Penginapan Keluarga. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 4(2), 58–70. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v4i2.3199>
- Marsinah, M., Indriani, R. R. F., Hatidah, H., & Purwanto, M. B. (2024). Pelestarian Kearifan Lokal Kain Tradisional Gambo: Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kebudayaan Masyarakat. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(2), 277–285. <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i2.1985>
- Marsinah, M., Umar, U., Hatidah, H., Indriani, R. A. F., & Purwanto, M. B. (2024). Entrepreneurship Education in Universities: A Review of Current Practices and Future Directions. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(6), 705–718. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i6.9561>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mu'allim, A., & Co-Promotor, M. I. S. (2023). Interpretasi produk pembiayaan PT BPR Syariah Dinar Ashri NTB berbasis fiqh muamalah.
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi akad wakalah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2), 232–238.
- Soleha, S., Nursobah, N., & Ma'rufi, M. (2023). Implementasi akad wakalah bil ujah dalam transaksi marketplace pada mahasiswa santri An-Nawawi Berjan Purworejo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Swarastuti, A., Budiyanto, B., & Purwanto, M. B. (2024). Management of English Learning to Improve Digital-Based Language Literacy Skills. *International*

Journal of Education, Vocational and Social Science, 3(01), 202–215.
<https://doi.org/10.99075/ijevss.v3i01.672>

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204.

Zubaidi, A. (2022). Application of *qardh*, *ijarah*, and *wakalah bil ujah* in financing contracts on financial technology. *Journal of Islamic Financial Studies*.

Elga Putri Asri, Ramdanil Mubarak, Jamila

Penerapan Prinsip Wakalah Bil Ujah Pada Pembayaran KRS Melalui Tokopedia:
Perspektif Fiqh Muamalah